



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN**

L K j I P

TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Lamongan
Megilan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjiaan Kinerja Tahun 2021. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang keuangan dan aset daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat daerah . Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase akurasi perencanaan APBD, Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target, Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP,
2. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset,
3. Nilai SAKIP BPKAD

Laporan Kinerja adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik yang merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan strategi dan kebijakannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan tolok ukur Badan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Kedudukan dan Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPKAD Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Progran Kerja, Pedoman Pelayanan Umum, Kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;

- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;
- d. Perumusan rencana pembangunan di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan program kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional;
- f. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

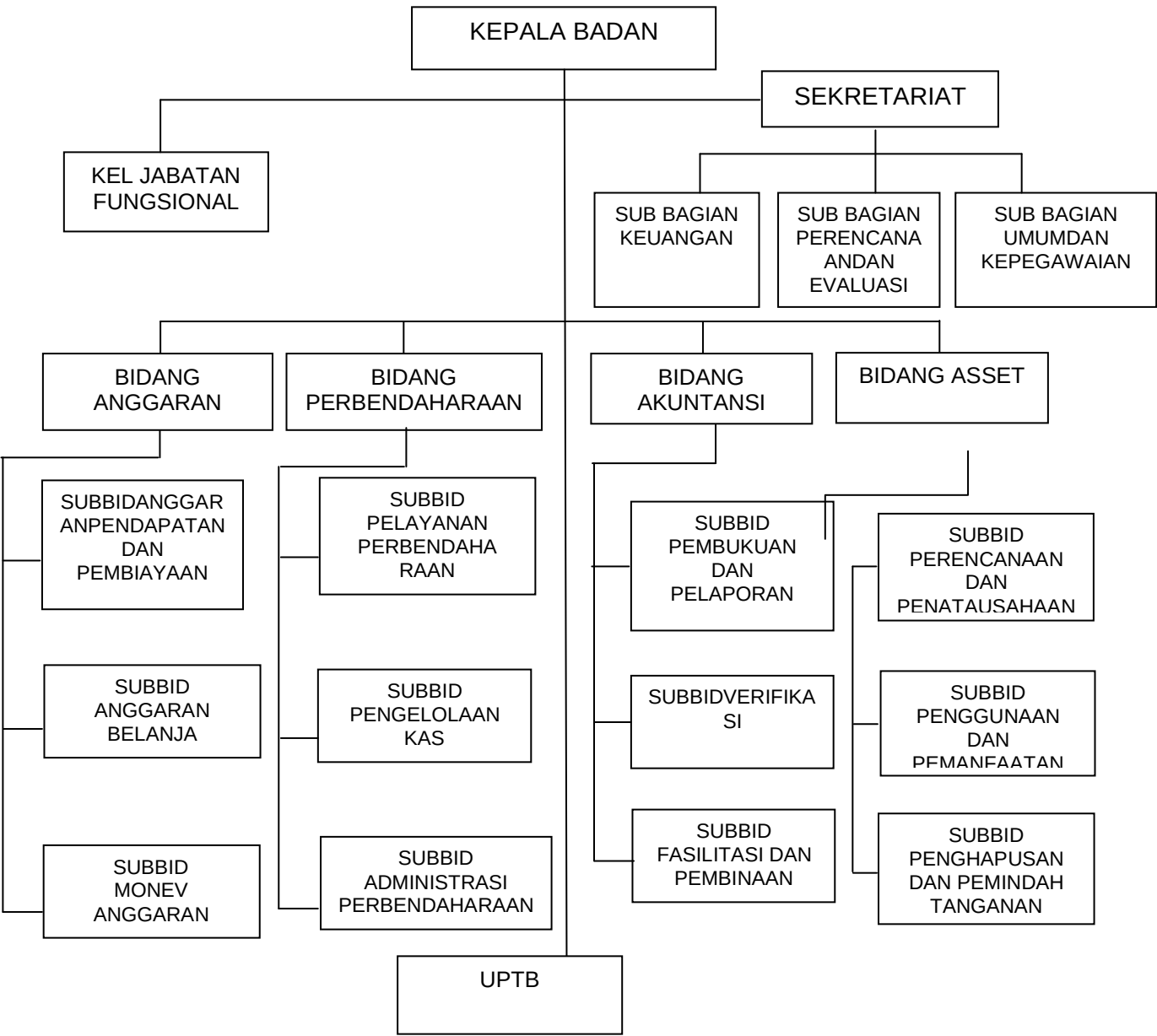
Selanjutnya berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Kepala Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja

- 3. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Perbendaharaan
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan
- e. Kepala Bidang Akuntansi, membawahi
 - 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 2. Kepala Sub Bidang Verifikasi
 - 3. Kepala Sub Bidang Fasilitas dan Pembinaan
- f. Kepala Bidang Aset, membawahi :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
 - 2. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
 - 3. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan digambarkan sebagaimana gambar 2-1

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Sumber :Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

C. DATA UMUM ORGANISASI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan

Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan sebagai berikut :

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	37
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	33
	Total	70

Adapun komposisi dan kebutuhan sumber daya manusia yang tersedia di tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi dan kebutuhan sumber daya manusia
Tahun 2021 - 2026

No	Nama Jabatan	Jumlah kondisi SDM saat ini			Jumlah kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2026	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0			1		1	
2	Sekretaris	1			1		1	
3	Kepala Bidang Anggaran	1			1		1	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	1			1		1	
5	Kepala Bidang Akuntansi	1			1		1	
6	Kepala Bidang Aset	1			1		1	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1			1		1	
7.1	Verifikator Data Laporan Keuangan	1			1		1	
7.2	Bendahara	1			1		1	
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1			1		1	
8.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan							
9	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	1			1		1	
9.1	Pengadministrasi Umum							
9.2	Pengadministrasi Kepegawaian							
9.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							
10	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan	1			1		1	
10.1	Analisis Perencanaan Anggaran							
10.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
11	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	1			1		1	
11.1	Analisis Perencanaan Anggaran							
11.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							

No	Nama Jabatan	Jumlah kondisi SDM saat ini			Jumlah kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2026	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
12	Kepala Sub Bidang Monev Anggaran	1			1		1	
12.1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
12.2	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran							
12.3	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran							
13	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Perbendaharaan	1			1		1	
13.1	Penata Keuangan							
13.1	Bendahara	1			1		1	
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	1			1		1	
14.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
14.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan							
14.3	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
15	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	1			1		1	
15.1	Penyusun Laporan Keuangan							
15.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan							
16	Kepala Sub Bidang Verifikasi	1			1		1	
16.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
17	Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan	1			1		1	
17.1	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran							
18	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan	0			1		1	
18.1	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris							
18.2	Kustodian Kekayaan Negara							
19	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan	1			1		1	
19.1	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah							
20	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan	0			1		1	
20.1	Kustodian Kekayaan Negara							
20.2	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah							

Keadaan pegawai menurut golongan jumlah pegawai BPKAD Golongan III (29) yang paling banyak, sedangkan untuk golongan paling sedikit adalah Golongan II (4) :

Tabel 1.3
Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	11
4.	Penata (III/c)	11
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	5
7.	Pengatur (II/c)	4

Keadaan pegawai menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Laki – Laki	Wanita	Jumlah
1	S-2	11	9	20
2	S-1	3	9	12
3	D.III	1	1	2
4	SLTA	3	-	2

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana BPKAD Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Roda 4 (empat)	24
2.	Roda 2 (dua)	50
3.	Komputer	111
4.	Printer	76
5.	Lap Top	29
6.	Mesin Ketik	7
7.	Mesin Foto Copy	2
8.	Mesin Ketik Elektrik	1
9.	Meja Rapat	30
10.	Meja Tulis/Staf	84
11.	Meja Kursi Tamu	6
12.	Meja Telepon	4
13.	Meja Komputer	5
14.	Meja Eselon II	1
15.	Meja Eselon III	5
16.	Meja Eselon IV	18
17.	Kursi Eselon II	2
18.	Kursi Eselon III	5
19.	Kursi Eselon IV	20
20.	Lemari Besi	33
21.	Lemari Kayu	13
22.	Rak Besi	25
23.	Rak Kayu	21
24.	Filling Kabinet	12
25.	Kipas Angin	4
26.	AC	31
27.	Brankas	4
28.	LCD Proyektor + Attachment	5
29.	Handy Cam	1
30.	Tabung PMK	3
31.	Papan Visual/SO	1
32.	Papan Pengumuman	16
33.	White Board	2
34.	White Board Elektronik	1
35.	Werelles	4
36.	Komputer Mainframe/Server	5
37.	UPS Stabilizer	1
38.	Pesawat Telepon	8
39.	Faximile	3
40.	Tangga Lipat	1
41.	Televisi	13
42.	Gambar Garuda	3

NO	JENIS	JUMLAH
43.	Korden	1
44.	Sound System	4
45.	Kursi Lipat	197
46.	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis	40
47.	Camera + Attachment	6
48.	Kaca Hias	3
49.	Gucci	5
50.	Almari Es	7
51.	Jam Dinding	6
52.	Kursi Kayu	7
53.	Almari BPKB	2
54.	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	96
55.	Dispenser	4
56.	Penghancur Kertas	3
57.	Scanner	2
58.	Mesin Potong Rumput	4
59.	Trolley	1
60.	Pompa Air	3
61.	Organ/Keyboard	2
62.	Meja Kecil/Rak TV	5
63.	Kursi Rapat/Putar	74
64.	Sofa	7
65.	Ventilator Udara	26
66.	Microphone Wirelles	1
67.	Microphone	3
68.	Stand Microphone	5
69.	Kursi Pelayanan gandeng 4	6
70.	Monitor/Dispai 20" Touch Screen	1
71.	Hardisk 3 Terabyte 7200 rpm	4
72.	Mesin Penyedot Debu	1
73.	Hardisk Server	1
74.	RAM Memory	2

3. Pembiayaan

Rincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :

TABEL : 1.3

PENDAPATAN

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET
	<u>PAD TA 2021</u>		
1.	<u>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</u> • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • Lain lain PAD yang sah	Rp 8.979.325.170,00 Rp 954.951.300,00 Rp 4.883.000.000,00 Rp 3.141.373.870,00	
2.	<u>Pendapatan Transfer</u> • Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat • Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 1.935.242.317.500,00 Rp 1.918.328.662.000,00 Rp 16.913.655.500,00	
3.	<u>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2018</u> • Pendapatan Hibah • Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	Rp 153.123.817.106,00 Rp 52.944.338.106,00 Rp 100.179.479.000,00	
Jumlah PAD BPKAD		Rp 2.097.345.459.776,00	

TABEL : 1.4
PEMBIAYAAN

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
1.	<u>APBD BPKAD TA 2019</u>		
	• Belanja Tidak Langsung • Belanja Langsung	Rp 625.042.705.541,00 Rp 39.935.994.300,00	
Jumlah APBD BPKAD		Rp 664.978.699.841,00	
2.	APBD I (Rincian sesuai dengan perkegiatan)	Rp --	
Jumlah APBD I		Rp --	
3	APBN (Rincian sesuai dengan perkegiatan)	Rp --	
Jumlah APBN		Rp --	
Jumlah total 1 + 2 + 3		Rp 664.978.699.841,00	

D. SISTEMATIKA PENYAYIAN LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. DATA UMUM ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
Program dan kegiatan
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. Pencapaian kinerja
 - 2. Perbandingan Realisasi kinerja
 - 3. Perbandingan Realisasi kinerja s/d akhir periode RPJMD/ RENSTRA
 - 4. Perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi Nasional
 - 5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
 - 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun pencapaian kinerja.
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. Matriks Rencana Strategis (RS);

2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
4. Lampiran lainnya, (Penghargaan, Inovasi, dll).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan manifestasi komitmen BPKAD Kabupaten Lamongan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. RPJMD Kabupaten Lamongan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPKAD Kabupaten Lamongan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Visi, Misi dan program Bupati Lamongan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan sehingga semua Langkah - langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Pernyataan Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Misi Kabupaten Lamongan :

Sesuai dengan visi “Terwujudnya kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai

upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Pada misi kelima ini, BPKAD Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. BPKAD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Lamongan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi

keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan 2021 – 2026 diatas adalah sejalan dengan MISI Kelima “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”, maka pengelolaan keuangan dan aset ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan Daerah” Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan Tujuan dan sasaran :

Tujuan :

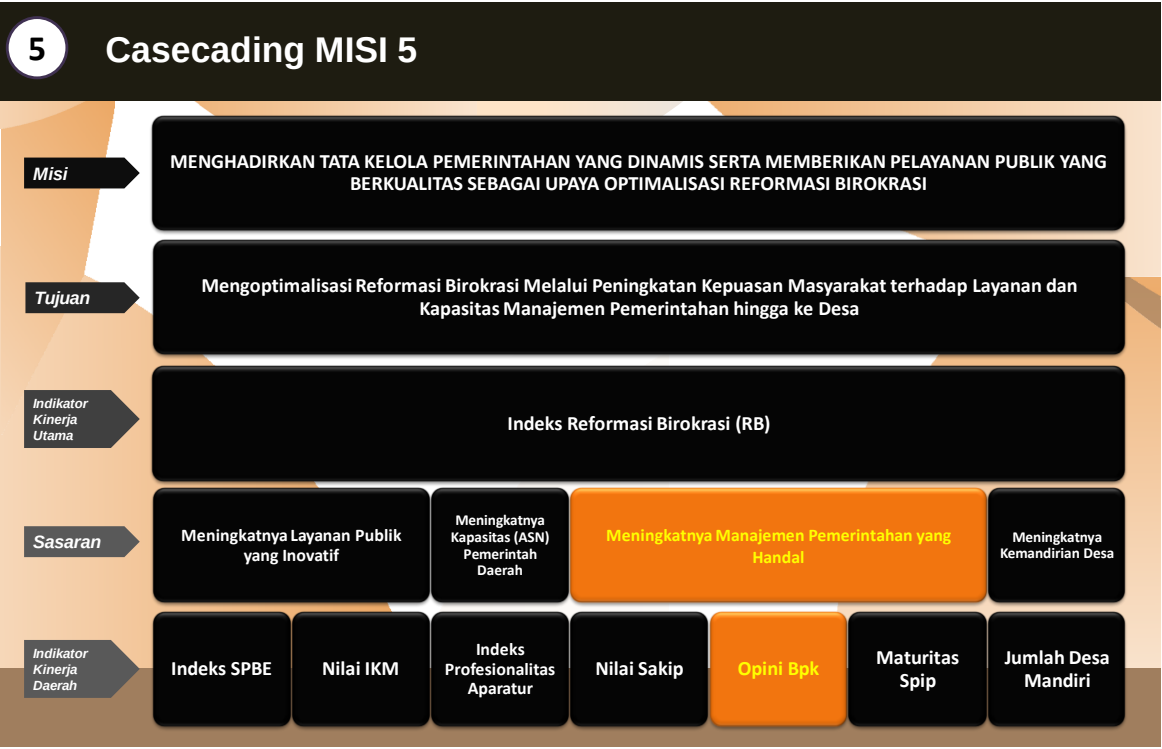
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi,

Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar Cascading Misi V Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 5 RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Opini BPK. Sehingga tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **“Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”**

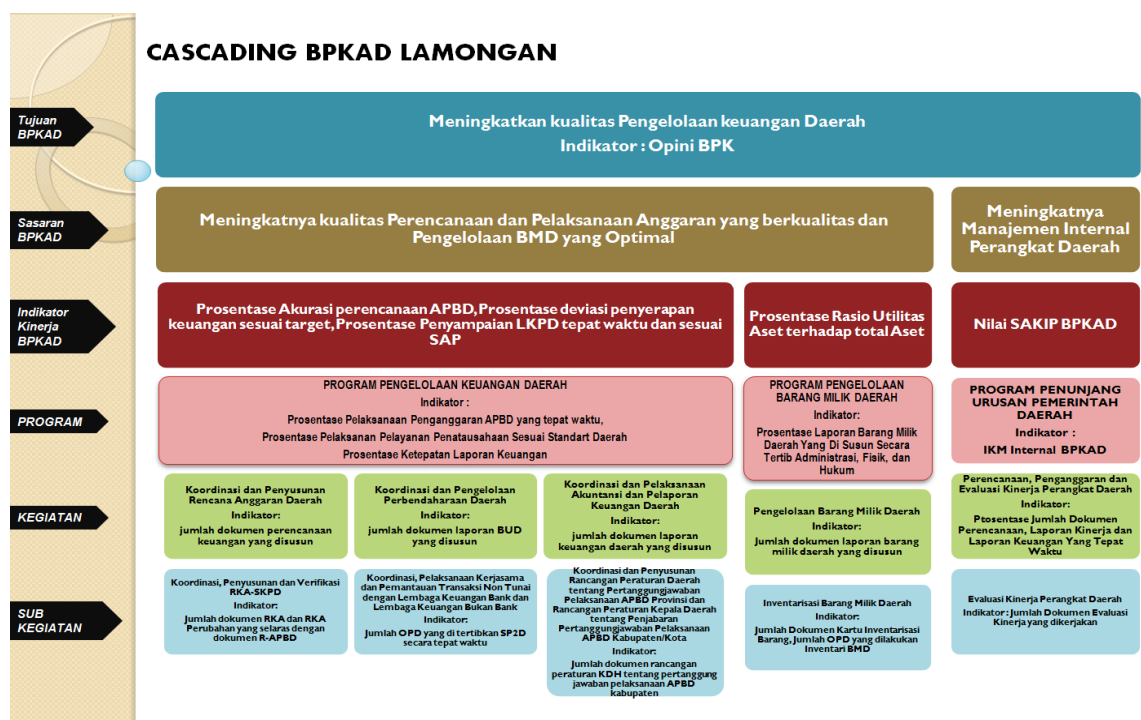
Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:



Gambar Cascading Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan capaian kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar Keselarasan Sasaran Program Dan Kegiatan Pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026.

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut;

TABEL TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	96%	97%	98%	99%
			Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%
			Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%	89%	91%	92%	93%
		2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89,81%	89,82%	89,83%	89,84%	89,85%

Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, BPKAD Kabupaten Lamongan merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

a. Strategi :

Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan. Strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Strategi diperlukan untuk mencapainya suatu sasaran. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

b. Arah Kebijakan :

Setelah strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan dan memperlancar capaian sasaran tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan

Oleh karena itu dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun n 2021-2026
MISI 5 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
TUJUAN Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa			
SASARAN Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelayanan Perbendaharaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset, Pelaporan keuangan Daerah Serta Pemantauan dan Pembinaan Teknis Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Terpadu	Kesesuaian serta efektivitas Kegiatan Pada Saat Penganggaran dan Perencanaan APBD
			Pengelolaan KAS sesuai dengan Penerimaan Dana Daerah
			Ketepatan Waktu dan Opini BPK di Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban APBD
			Peningkatan Utilitas Penggunaan Aset Daerah serta Pengelolaan Penatausahaan Aset

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap arah kebijakan RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel Linearitas arah kebijakan RPJMD dengan Renstra-PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah	Kesesuaian serta efektivitas Kegiatan Pada Saat Penganggaran dan Perencanaan APBD	√	√	√	√	√	√
		Pengelolaan KAS sesuai dengan penerimaan dana daerah	√	√	√	√	√	√
2.	Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Peningkatan Utilitas Penggunaan Aset Daerah serta Pengelolaan Penatausahaan Aset	√	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu dan Opini BPK di Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	√	√	√	√	√	√

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

➤ **Sasaran dan Indikator Sasaran**

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.3
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	➤ Prosentase Akurasi penganggaran APBD . ➤ Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target. ➤ Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP. ➤ Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset.
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	➤ Nilai Sakip BPKAD

➤ **Program dan Kegiatan**

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/ barang daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan dan sub kegiatan yang nantinya dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/ barang daerah.

Adapun kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan serta sub kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

Tabel :
Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Indikator Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ

		Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPR)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan mobil jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D

	Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	seacara tepat waktu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun

	Pelaksanaan APBD	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMMD
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan
	Optimalisasi Penggunaan,	Jumlah barang milik daerah yang akan

	Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89%

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 disusun mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada Lampiran (Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKJIP disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra Badan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus nya sebagai berikut :

Capaian		X100%
Indikator Kinerja	Realisasi Pendapatan + Realisasi Pembiayaan netto	

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Dalam melakukan pengukuran kinerja yang ditentukan, dapat dilihat pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

1) Sasaran, Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Untuk mencapai sasaran Tersebut, pada tahun 2021 dilaksanakan 2 program yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- 1. Prosentase Akurasi penganggaran APBD ;

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai % Akurasi penganggaran APBD Tepat Waktu adalah sebesar 99%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

2. Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target;

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai % deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah sebesar 9,8%. Target ini Lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7.50%. disebabkan karena adanya kegiatan pembinaan kepada OPD tentang penyerapan realisasi belanja daerah dan perencanaan keuangan dalam realisasi anggaran lebih baik.

3. Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai % Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP adalah sebesar 100%. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

4. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset adalah sebesar 95%. Target ini lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 97%. hal ini disebabkan karena adanya tertib administrasi data aset terkait data bangunan gedung yang sudah di kapitalisasi keinduknya , penertiban inventarisasi barang milik daerah (BMD) yang sudah sesuai, sudah ada pengusulan barang dan dimasukkan kedalam aset lain-lain, adanya pelaksanaan rekonsiliasi dengan OPD yang dilakukan secara Rutin.

TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021

SASARAN			CAPAIAN TAHUN 2019			CAPAIAN TAHUN 2020			CAPAIAN TAHUN 2021		
URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3							4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan	Prosentase Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan	96%	100%	104%	97%	100%	111%	99%	100%	100%
		Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	9.85%	6.4%	153%	9,85%	7,04%	139,91%	9,85%	7, 5%	7,5%
		Prosentase Data aset yang akurat	80%	96%	120%	85%	97%	114,12%	95%	97%	97%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran mencerminkan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam kategori **Sangat Berhasil**.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD DAN PROGRAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

Realisasi kinerja pada tahun 2021 selaras dengan Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab.Lamongan Tahun 2016-2021), sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Program RPJMD 2010-2015	Program Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	% Indikator Sasaran
• Program Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah • Program Pengelolaan	• % Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan • Opini pemeriksa eksternal

	Pelaporan Keuangan Daerah • Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
--	---	--

Realisasi Kinerja pada tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 3 program, 13 kegiatan dan 72 Sub kegiatan telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditetapkan

Dari 4 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun dalam Renstra OPD, akan tetapi terdapat 3 indikator sasaran yang realisasinya diatas target yang ditetapkan yaitu pada indikator sasaran :

➤ Prosentase Akurasi penganggaran APBD ;

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai % Akurasi penganggaran APBD Tepat Waktu adalah sebesar 99%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

➤ Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target;

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai % deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah sebesar 9,8%. Target ini Lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7.50%. disebabkan karena adanya kegiatan pembinaan kepada OPD tentang penyerapan realisasi belanja daerah dan perencanaan keuangan dalam realisasi anggaran lebih baik.

➤ Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk menilai prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset adalah sebesar 95%. Target ini lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 97%. hal ini disebabkan karena adanya tertib administrasi data aset terkait data bangunan gedung yang sudah di kapitalisasi keinduknya , penertiban inventarisasi barang milik daerah (BMD) yang sudah sesuai, sudah ada pengusulan barang dan dimasukkan kedalam aset lain-lain, adanya pelaksanaan rekonsiliasi dengan OPD yang dilakukan secara Rutin.

Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan target atau kurang dari target maupun melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Penyusunan KUA tidak tepat waktu sesuai Permendagri 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 dikarena sesuai jadwal yang diberikan oleh DPRD ke Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD
- b. Perencanaan Alokasi Anggaran kurang konsisten dengan RKPD dikarenakan banyaknya regulasi terkait refocusing untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

- c. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada beberapa OPD, sehingga pencairan terlambat dan tidak sesuai dengan anggaran kas.
- d. Saat ini diperlukan pengembangan Aplikasi system informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022
- e. Kompetensi dan pemahaman terhadap Akuntansi Pemerintah yang kurang merata.
- f. Penerapan Aplikasi dan Badan Akun Standar yang baru sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
- g. Masih adanya Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan bentuk dan fisiknya (dengan kata lain dalam pencatatannya ada namun keadaan di lapangan tidak ditemukan barang dan fisiknya)
- h. Belum Optimalnya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah (pengamanan asset secara hukum)
- i. Masih banyak asset Tanah yang belum memiliki papan kepemilikan. (Dalam hal ini guna pengamanan asset secara fisik).
- j. Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi Aset (e-Aset), Hal ini dikarenakan belum tersedianya beberapa Modul yang dibutuhkan guna pengelolaan Aset yang baik.
- k. Rendahnya SDM Pengurus Barang Milik Daerah terhadap pemahaman peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- l. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah, Khusus tanah, guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- m. Masih adanya Barang Milik Daerah berupa tanah yang tercatat ganda dengan pemerintah Desa, sehingga proses penseftifikan tanah menjadi terhambat.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

- a. Harus disosialisasikan kepada DPRD/ Sekretariat DPRD terkait Penyusunan KUA dan APBD harus sesuai Permendagri 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 dan apabila tidak sesuai dengan jadwal maka dipastikan tidak akan mendapat Dana Insentif Daerah (DID)
- b. Regulasi dan Kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah idealnya di terbitkan sebelum Pembahasan RKPD, KUA dan APBD di susun sehingga sinkronisasi RKPD dengan KUA, APBD tetap terjaga. Namun dalam kondisi force majeure hal tersebut tidak bisa

tercapai, yang terpenting regulasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

- c. Melaksanakan bimtek/pelatihan untuk pejabat pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah secara kontinu.
- d. Membentuk Tim dalam pelaksanaan Aplikasi Penatausahaan keuangan dan melakukan Bimtek terkait Aplikasi SIPD Penatausahaan keuangan Daerah.
- e. Pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM dimasing-masing OPD
- f. Pemberlakuan dan Penerapan Aplikasi lama (SAKTI) secara bersamaan untuk menjamin semua proses transaksi tercatat dengan baik dan dapat Menyusun laporan keuangan konsolidasi tepat waktu.
- g. Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah ke seluruh OPD guna pendataan barang – barang milik daerah yang tidak ditemukan fisiknya, selanjutnya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Meningkatkan koordinasi kepada OPD guna pengoptimalan dan percepatan proses perpertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah
- i. Meningkatkan jumlah pengadaan Papan kepemilikan Tanah milik Daerah guna pengamanan asset secara fisik
- j. Menambah modul aplikasi Aset (e-aset), guna ketersediaan beberapa modul yang dibutuhkan.
- k. Mengadakan Pelatihan/ bimbingan teknis terhadap Pengurus Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pemahaman SDM mengenai berbagai macam peraturan perundangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.
- l. Melakukan pendataan dan inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah serta menawarkan ke pihak ketiga untuk memanfaatkan barang milik daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- m. Mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar dapat menerbitkan regulasi yang bersinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa terkait dengan tanah tanah milik desa yang diatasnya terdapat bangunan milik pemerintah kabupaten.

2. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 36.453.101.365,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 33.027.299.105,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 3.425.802.260,00 Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan berjumlah 35 orang, jumlah personil tersebut dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dari 13 (tiga belas) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat 2 kegiatan yang realisasi nya kurang dari 90 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.702.409.400,00 yang di pergunakan untuk Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 672.948.550,00 atau 39,53%. Realisasi Kegiatan tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan belanja sesuai kebutuhan .

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 2.261.484.000,00 yang di pergunakan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.566.569.351,00 atau

69,27%. Kegiatan tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2021

Akuntabilitas keuangan menunjukkan seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 :

1. PENDAPATAN

Target pendapatan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 2.097.345.459.776,00 target ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	8.979.325.170,00
2.	Pendapatan Transfer	1.935.242.317.500,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	153.123.817.106,00
	Total	2.097.345.459.776,00

Dari target tersebut pada tahun 2021 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.019.967.509.519,88 Atau tercapai sebesar 96,31% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	15.781.590.260,88
2.	Pendapatan Transfer	1.889.575.218.984,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	114.610.700.275,00
	Total	2.019.967.509.519,88

2. BELANJA

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
	BELANJA	
1.	Belanja Operasi	20.259.104.274,00
2.	Belanja Modal	1.736.344.400,00
3.	Belanja Tak Terduga	30.000.000.000,00
	TRANSFER	
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.961.299.527,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	597.021.951.640,00
	Total Belanja dan Transfer	664.978.699.841,00

Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp. 650.832.784.566,98 Atau tercapai sebesar 97,87% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
	BELANJA	
1.	Belanja Operasi	17.827.280.863,00
2.	Belanja Modal	728.109.100,00
3.	Belanja Tak Terduga	19.385.935.437,28
	TRANSFER	
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.934.507.526,70
2.	Transfer Bantuan Keuangan	596.956.951.640,00
	Total Belanja dan Transfer	650.832.784.566,98

Rincian belanja tahun 2021 sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3
DATA PENCAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.257.808.274,00	13.867.363.838,00	80,35
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	68.921.300,00	91,90
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	21.117.600,00	84,47
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	25.000.000,00	24.188.200,00	96,75

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	23.615.500,00	94,46
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.144.224.374,00	10.534.994.891,00	86,75
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.003.354.374,00	10.394.908.441,00	86,60
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.286.000,00	46.285.950,00	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.243.600,00	32.238.100,00	99,98
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.340.400,00	61.562.400,00	98,75
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.010.800,00	402.223.746,00	89,58
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.000.000,00	54.578.800,00	99,23
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.100.000,00	70.464.000,00	99,11
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	74.593.900,00	99,46
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.706.800,00	49.632.000,00	99,85
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.204.000,00	49.385.500,00	92,82
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.000.000,00	103.569.546,00	71,43
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.702.409.400,00	672.948.550,00	39,53
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.540.489.100,00	545.705.800,00	35,42
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		
17	Pengadaan Mebel	52.600.000,00	52.557.750,00	99,92
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.320.300,00	74.685.000,00	68,32
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.261.484.000,00	1.566.569.351,00	69,27
19	Penyediaan Jasa Komunikasi,	1.367.000.000,00	767.678.315,00	56,16

	Sumber Daya Air dan Listrik			
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.484.000,00	798.891.036,00	89,31
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.679.700,00	621.706.000,00	99,36
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	49.281.850,00	98,56
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	89.112.550,00	99,01
23	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.985.000,00	99,97
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	425.679.700,00	423.476.600,00	99,48
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	646.810.891.567,00	636.060.306.153,98	98,34
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.501.740.400,00	1.469.419.900,00	97,85
26	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	130.303.500,00	129.898.400,00	99,69
27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	163.830.000,00	162.851.700,00	99,40
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	112.000.500,00	105.499.600,00	94,20
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	83.400.100,00	83.400.000,00	100,00
30	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	467.090.000,00	449.458.000,00	96,23
31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	371.004.000,00	365.201.200,00	98,44
32	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	106.647.300,00	105.646.000,00	99,06
33	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.465.000,00	67.465.000,00	100,00
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.350.000.000,00	1.341.715.300,00	99,39
34	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	125.000.000,00	124.963.100,00	99,97
35	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	70.000.000,00	69.570.000,00	99,39

	Sebelumnya			
36	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	125.000.000,00	125.000.000,00	100
37	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	16.307.300,00	16.307.300,00	100
38	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	100
39	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	158.950.000,00	157.990.000,00	99,40
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.000.000,00	49.581.000,00	99,16
41	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0		
42	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	333.550.000,00	327.627.800,00	98,22
43	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	132.500.000,00	132.317.800,00	99,86
44	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	213.692.700,00	213.358.300,00	99,84
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	880.000.000,00	876.144.850,00	99,56
45	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0		
46	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	129.190.400,00	128.685.300,00	99,61

	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
47	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	142.201.600,00	142.201.600,00	100
48	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	195.623.300,00	195.623.300,00	100
49	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	292.517.400,00	292.402.400,00	99,96
50	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	29.000.000,00	26.540.000,00	91,52
51	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0		
52	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0		
53	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	91.467.300,00	90.692.250,00	99,15
54	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0		
55	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	0		
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	643.033.251.167,00	632.327.126.103,98	98,34
56	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0
57	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	613.033.251.167,00	612.941.190.666,70	99,98
58	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.000.000.000,00	19.385.935.437,28	64,62
12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	45.900.000,00	45.900.000,00	100

59	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45.900.000,00	45.900.000,00	100
60	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	910.000.000,00	905.114.575,00	99,46
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	910.000.000,00	905.114.575,00	99,46
61	Penyusunan Standar Harga	75.000.000,00	75.000.000,00	100
62	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.000.000,00	33.097.500,00	94,56
63	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100
64	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100
65	Penatausahaan Barang Milik Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100
66	Inventarisasi Barang Milik Daerah	125.000.000,00	124.997.500,00	100
67	Pengamanan Barang Milik Daerah	175.000.000,00	173.704.000,00	99,26
68	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	60.000.000,00	59.998.700,00	100
69	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	28.847.000,00	96,16
70	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100
71	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	99.470.000,00	99,47
72	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	174.999.875,00	100

Untuk mewujudkan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) sub kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2021, tersedia dana sebesar Rp. 664.978.699.841,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2021, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 650.832.784.566,98 sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 14.145.915.274,02 .

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2021 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas terdapat 13 (Tiga Belas) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 - 2026 sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/ Barang Daerah sehingga dapat tercapai tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/ barang daerah.

Lamongan, Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805-198903 1 010